

# AUDI

## JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS

**Analisis Kinerja Kawasan Metropolitan Sarbagita**

Ni Made Adi Erawati

**Hermeneutika Dalam *Interpretive Paradigm* Sebagai Metodologi  
Penelitian Akuntansi**

I Gde Ary Wirajaya

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Pengungkapan Tanggung  
Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Perusahaan Manufaktur  
Di Bursa Efek Indonesia**

Agung Suaryana & Febriana

**Indikasi Manajemen Laba Oleh *Chief Executive Officer* (CEO) Baru  
Pada Perusahaan-Perusahaan Yang Terdaftar Di Pasar Modal Indonesia**

Gerianta Wirawan Yasa & Yulia Novialy

**Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan *Good Governance***

Jajang Badruzaman & Irma Chairunnisa

**Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap  
Penerimaan PPH Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada  
KPP Pratama Denpasar Timur**

Maria M. Ratna Sari & Ni Nyoman Afriyanti

**Pengaruh Kondisi Keuangan, Pertumbuhan Perusahaan, Dan Reputasi  
Auditor Pada Pengungkapan Opini Audit *Going Concern***

Ni Putu Meriani & Komang Ayu Krisnadewi

**Analisis Tingkat Pemahaman Wajib pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan  
*Self Assesment System* Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan**

Ni Luh Supadmi & Wiwik Andryani

**Peluang Riset Akuntansi Berbasis Akrual Di Indonesia**

Sansaloni Butar-Butar

**Analisis Pengaruh Opini Audit *Going Concern* Dan Pergantian  
Manajemen Pada *Auditor Switching***

Nur Wahyuningsih & I Ketut Suryanawa



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS UDAYANA  
DENPASAR BALI**

Injans



# AUDI

**JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS**

Jl. P.B. Sudirman Denpasar  
Telp. (0361) 224133 Fax. (0361) 241929  
website : <http://ejournal.unud.ac.id>

ISSN 1907-3771



---

<b>Analisis Kinerja Kawasan Metropolitan Sarbagita</b> Ni Made Adi Erawati	1
<b>Hermeneutika Dalam <i>Interpretive Paradigm</i> Sebagai Metodologi Penelitian Akuntansi</b> I Gde Ary Wirajaya	14
<b>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia</b> Agung Suaryana & Febriana	20
<b>Indikasi Manajemen Laba Oleh <i>Chief Executive Officer (CEO)</i> Baru Pada Perusahaan-Perusahaan Yang Terdaftar Di Pasar Modal Indonesia</b> Gerianta Wirawan Yasa & Yulia Novialy	40
<b>Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap Penerapan <i>Good Governance</i></b> Jajang Badruzaman & Irna Chairunnisa	57
<b>Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPH Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur</b> Maria M. Ratna Sari & Ni Nyoman Afriyanti	71
<b>Pengaruh Kondisi Keuangan, Pertumbuhan Perusahaan Dan Reputasi Auditor Pada Pengungkapan Opini Audit <i>Going Concern</i></b> Ni Putu Merlani & Komang Ayu Krisnadewi	84
<b>Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan <i>Self Assesment System</i> dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan</b> Ni Luh Supadmi & Wiwik Andryani	108
<b>Peluang Riset Akuntansi Berbasis Akrual Di Indonesia</b> Sansaloni Butar-Butar	126
<b>Analisis Pengaruh Opini Audit <i>Going Concern</i> Dan Pergantian Manajemen Pada Auditor <i>Switching</i></b> Nur Wahyuningsih & I Ketut Suryanawa	144

---

**SUSUNAN DEWAN REDAKSI JURNAL AUDI**  
**JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS**  
**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS UDAYANA**

**Pemimpin Redaksi**

Dr. I Dewa Nyoman Badera, SE., M.Si

**Redaktur Pelaksana**

Komang Ayu Krisnadewi, SE., M.Si., Ak.  
I Gst. Ngr. Agung Suaryana, SE., M.Si

**Editor Pelaksanaan**

Drs. Wayan Teguh, M.Hum  
Eka Ardhani Sisdyani, SE., M.Com., Ak

**Editor Ahli**

Prof. Dr. Ketut Rahyuda, SE., M. S.I.E (*Universitas Udayana*)  
Prof. Dr. Sukrisno Agoes, Ak., MM (*Universitas Tarumanegara*)  
Prof. Dr. H. Iman Ghozali, M.Com, Ak (*Universitas Diponegoro*)  
Prof. Dr. Indra Wijaya Kusuma, MBA (*Universitas Gadjah Mada*)  
Prof. Eko Ganis Sukomiharjo, M.Com. Hons, Ph.D (*Universitas Brawijaya*)  
Prof. Dr. I Wayan Ramantha, SE, MM., Ak., CPA (*Universitas Udayana*)  
Prof. Dr. Moch. Nasir, M.Si., Ak (*Universitas Diponegoro*)  
Prof. Dr. Yuskar, SE, MA, AK (*Universitas Andalas*)  
Drs. Basuki, M.Com (Hons)., Ph.D., Ak (*Universitas Airlangga*)  
Dr. Khomsiyah, M.Si., Ak (*Universitas Trisakti*)  
Dr. I Wayan Suartana, M.Si, Ak (*Universitas Udayana*)  
Dr. I Made Sukartha, M.Si, Ak (*Universitas Udayana*)  
Dr. AAGP Widana Putra, M.Si, Ak (*Universitas Udayana*)

**Alamat Redaksi**

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Udayana  
Jl. P.B. Sudirman Denpasar  
Telepon (0361) 244133 Faximili (0361) 241929  
website : <http://ejournal.unud.ac.id>

Jurnal AUDI diterbitkan oleh Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, dimaksudkan sebagai media pertukaran informasi dan karya ilmiah antara staf pengajar, alumni, mahasiswa pembaca yang berminat dan masyarakat pada umumnya. Untuk sementara jurnal ini terbit dua kali dalam satu tahun yaitu kurun waktu Januari - Juni dan Juli - Desember

Redaksi menerima naskah yang belum pernah diterbitkan atau dalam proses diterbitkan oleh media lain. Pedoman penulisan naskah untuk jurnal AUDI tercantum pada bagian lain jurnal ini.

Surat menyurat mengenai naskah yang akan diterbitkan, langganan, keagenan dan lainnya dapat dialamatkan ke alamat redaksi.

## **KEBIJAKAN EDITORIAL**

Jurnal AUDI adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Jurnal AUDI akan Mempublikasikan artikel-artikel kajian empiris maupun teoritis yang meliputi bidang : akuntansi keuangan, pasar modal, akuntansi manajemen, akuntansi sektor publik, sistem informasi dan perpajakan.

Redaksi menerima sumbangan artikel empiris maupun teoritis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Penulis harus menyatakan bahwa artikel yang dikirim ke jurnal AUDI tidak dikirimkan atau telah dipublikasi dalam jurnal yang lain. redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa ,mengubah maksud dan isinya. Pendapat yang dinyatakan dalam jurnal ini merupakan pendapat pribadi penulis, serta tidak mencerminkan pendapat penerbit dan dewan redaksi.

Artikel yang dikirim kepada redaksi harus merupakan karya asli dan tidak dipertmbangkan untuk diterbitkan penrbit lain. Penentuan artikel yang dimuat dalam jurnal AUDI akan direview kelayakannya oleh editor ahli dengan sitem *blind review*.

### **Alamat Redaksi**

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Udayana  
Jl. P.B. Sudirman, Denpasar, Telp. (0361) 224133  
website : <http://ejournal.unud.ac.id>

## **PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL "AUDI"**

### **FORMAT**

1. Naskah adalah karya asli penulis yang belum pernah dipublikasikan dalam media cetak lain.
2. Naskah diketik rapi pada satu sisi kertas ukuran kuarto dengan spasi ganda, kecuali untuk kutipan langsung di *indent* (ditulis satu spasi). Jenis huruf naskah adalah *Bookman Old Style* ukuran 12 dan diketik dalam program *Microsoft Word*.
3. Panjang naskah yang diserahkan antara 15 - 20 halaman (tidak termasuk daftar pustaka) dengan margin atas, bawah, kiri dan kanan adalah 1 inci. Naskah yang dikirim disertai dengan disket/CD yang berisi hasil tulisan.
4. Sistematika pembahasan dalam artikel terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:
  - (a) Judul, nama penulis (tanpa gelar), lembaga
  - (b) Abstrak
  - (c) Batang tubuh:

**Kajian Empiris (Penelitian)** : I. Pendahuluan (latar belakang dan masalah), II. kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis, III. Metodologi, IV. Hasil dan pembahasan, V. Simpulan, Keterbatasan Penelitian dan Saran.

**Kajian Teoritis** : I. Pendahuluan (latar belakang dan masalah), II. Tinjauan Teori, III. Pembahasan, IV. Simpulan.
5. Penulisan Sub judul menggunakan angka Romawi, I, II, III, IV, sedang sub judul dengan angka Arab dan seterusnya.
6. Halaman, tabel, gambar, dan lampiran harus diberi nomor urut, Khusus tabel dan gambar harus diberikan keterangan (judul) tabel. Penomorannya mempergunakan angka Arab. Setiap tabel diberikan judul dan dicetak ditengah gambar, diagram dan grafik.

### **ABSTRAK**

1. Ditengah merupakan ringkasan yang padat mengenai isi naskah yang berisi antara lain seputar pertanyaan atas permasalahan, metodologi, temuan serta kontribusi atas naskah. Panjang abstrak sekitar 150-300 kata dan harus dicantumkan pada setiap naskah.
2. untuk naskah berbahasa Indonesia, abstrak sebaliknya dibuat dalam bahasa Inggris sedangkan untuk naskah berbahasa Inggris, abstrak dibuat dalam bahasa Indonesia. Abstrak ditulis dengan menggunakan huruf miring (*italic*).
3. Abstrak harus memuat sedikitnya empat keyword (kata kunci) untuk memudahkan penyusunan indeks naskah.

**PENGARUH IMPLEMENTASI  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*  
(Sensus pada 14 Dinas Daerah di Pemerintah Kabupaten Ciamis)**

Oleh:  
**Dr. Jajang Badruzaman, SE., MSI, Ak., CA**



**PROGRAM AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA**

**ABSTRACT**  
**THE INFLUENCE OF THE IMPLEMENTATION**  
**OF ACCOUNTABILITY SYSTEM OF GOVERNMENT INSTITUTION ABILITY**  
**ON THE APPLICATION OF GOOD GOVERNANCE**  
**(CENSUS IN 14 LOCAL DEPARTEMENTS IN CIAMIS REGENCY)**

*This research purposed to know (1) The implementation of Accountability System of Government Institution Ability in 14 Local Departments in Ciamis Government Regency (2) The application of good governance in 14 Local Departments in Ciamis Government Regency (3) The influence of The implementation of Accountability System of Government Institution Ability on the application of good governance in 14 Local Departments in Ciamis Government Regency. The research methode used in this research is analysis descriptive methode with census approach. Analysis methode used is correlations coefisien analysis and determination coefisien analysis with software spss 16.0 for windows to process the data of quetionary. The result of this research shows that : (1) The implementation of Accountability System of Government Institution Ability in 14 Local Departments in Ciamis Government Regency is good (2) The application of good governance in 14 Local Departments in Ciamis Government Regency is good (3) The implementation of Accountability System of Government Institution Ability has a strong correlations with the application of good governance in 14 Local Departments in Ciamis Government Regency and has influence 61%.*

**ABSTRAK**  
**PENGARUH IMPLEMENTASI**  
**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**  
**TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE**  
**(Sensus pada 14 Dinas Daerah di Pemerintah Kabupaten Ciamis)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 14 Dinas Daerah di Pemerintah Kabupaten Ciamis (2) penerapan *good governance* pada 14 Dinas Daerah di Pemerintah Kabupaten Ciamis (3) pengaruh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan *good governance* pada 14 Dinas Daerah di Pemerintah Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan sensus. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis koefisien korelasi dan analisis koefisien determinasi dengan bantuan *software SPSS 16.0 for windows* untuk mengolah data kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 14 Dinas Daerah di Pemerintah Kabupaten Ciamis baik (2) penerapan *good governance* pada 14 Dinas Daerah di Pemerintah Kabupaten Ciamis baik (3) implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memiliki hubungan yang kuat dengan penerapan *good governance* pada 14 Dinas Daerah di Pemerintah Kabupaten Ciamis dan memiliki pengaruh sebesar 61%.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Istilah *governance* sebenarnya istilah lama yang dipopulerkan kembali oleh Bank Dunia pada tahun 1992 dalam *report*-nya yang berjudul : “*Governance and Development*”. Bank Dunia menggarisbawahi, bahwa pemerintah adalah sumber kegagalan pembangunan. Pemerintahan yang besar akan menghasilkan *bad governance*. “*Big government is bad governance*”. Disimpulkan bahwa : “*Good governance is less government, good goveranance is better government*”.

Gerakan *good goveranance* mulai digelindingkan pada awal tahun 1990-an sebagai bentuk perlawanan terhadap konsep *government* yang dinilai memiliki banyak kelemahan karena meremehkan kekuatan atau minimnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Konsep ini masuk ke Indonesia melalui program “*good goveranance*” yang dipelopori oleh lembaga donor, seperti Bank Dunia, ADB, IMF dan lain-lain pada akhir tahun 1990-an. Program ini menyatu dalam program bantuan / pinjaman, termasuk bantuan teknis kepada pemerintah dan *civil society* yang kemudian disambut oleh lembaga non pemerintah untuk revitalisasi diri dan juga oleh lembaga pemerintah untuk menghadang delegitimasi yang kemudian mendominasi arah reformasi birokrasi pemerintah.

Sebelum wacana *good goveranance* mendominasi arah reformasi birokrasi pemerintahan di Indonesia, terminologi seperti “*Less Government, Enterpreurial Government*” dan sejenisnya sempat menjadi wacana yang ditulis oleh Ted Gaebler dan David Osborne (1992), yaitu “*Reinventing Government*” yang kemudian populer dengan “*Enterpreurial Government*” (Pemerintahan Wirausaha). Hal tersebut telah menjadi rujukan penting bagi birokrasi pemerintahan di Indonesia dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Dalam buku “*Reinventing Government*” berpendapat bahwa kegagalan utama pemerintahan adalah karena kelemahan manajemennya. Masalahnya bukan terletak pada apa yang dikerjakan pemerintah, melainkan bagaimana cara pemerintah mengerjakannya. Buku ini dianggap sebagai awal dari kampanye “*good governance*”. Kemudian pada tahun 1996, Plastrik dan Osborne menerbitkan judul “*Banishing Bureaucracy*” menyarankan agar birokrasi dipangkas supaya menjadi lebih efektif dan efisien. Prinsipnya adalah “*The least government is the best government*”. Konsep dan prinsip-prinsip tersebut begitu cepat meluas ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia.

Di Indonesia, sejak tahun 1998 ada kerjasama dengan UNDP, yaitu program untuk lebih memberdayakan *governance* dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Program tersebut dikenal dengan : “*Partnership to Support Governance Reform in Indonesia*” dari UNDP, *World Bank*, dan *Asian Development Bank* (ADB). Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atau “*Partnership for Governance Reform in Indonesia*” yang merupakan kerjasama antara UNDP, *World Bank*, ADB beserta negara-negara sahabat, masyarakat madani dan pemerintah Indonesia. Melalui program inilah “*good governance*” menjadi semakin populer di Indonesia.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari budaya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR No. XI/MPR/1988 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 TAP MPR tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Bentuk dan cermin akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu dengan dikeluarkannya beberapa peraturan, seperti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan beberapa Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari undang-undang dimaksud, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 Tahun 2000.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, untuk menyelenggarakan pemerintah, Gubernur selaku penyelenggara eksekutif daerah di bidang otonomi daerah bertanggungjawab pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah bertanggungjawab kepada Presiden. Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten/Kota, Bupati atau Walikota bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan berkewajiban memberikan laporan kepada Presiden Melalui Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

Dikaitakan dengan masalah akuntabilitas dalam artian pertanggungjawaban, maka di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 secara tegas dikemukakan dalam beberapa pasal berikut : Pasal 27 ayat (2) *Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPR, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat ;* ayat (3) *Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati / Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;* Ayat (4) *Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) digunakan pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Sebagai penjabaran lebih lanjut telah dikeluarkan serangkaian Peraturan Pemerintah dan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban (baca akuntabilitas), terutama tercermin dalam PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Dalam penjelasan PP Nomor 108 ini, dikemukakan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah, pada prinsipnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 5 (lima) tahun. Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Daerah kepada DPRD bukan merupakan wahana untuk menjatuhkan Kepala Daerah, akan tetapi merupakan wahana untuk penilaian dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menentukan kelemahan pelaksanaan pemerintah daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan.

Selanjutnya beberapa pasal dalam PP Nomor 108 Tahun 2000 yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dan menarik untuk dikemukakan adalah sebagai berikut : Pasal (1) butir-butir : *Rencana strategik atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang disyahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan misi, visi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan daerah. Pertanggungjawaban akhir tahunan anggaran adalah pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolak ukur Renstra.*

Dari gambaran mekanisme dan substansi LPJ ini maka pertanggungjawaban ini pada hakikatnya merupakan akuntabilitas horizontal. Kepala Daerah kepada masyarakat melalui DPRD, mekanisme dan substansi pertanggungjawaban telah dimulai pada saat pengesahan Renstra oleh DPRD, yang selanjutnya Renstra ini merupakan tolak ukur bagi akuntabilitas Kepala Daerah. Kemudian secara lebih mendalam substansi dari LPJ dan periodisasinya, meliputi pertanggungjawaban akhir tahun anggaran; pertanggungjawaban akhir masa jabatan; dan pertanggungjawaban untuk hal tertentu. Selanjutnya secara substansial dikemukakan bahwa pertanggungjawaban akhir tahun anggaran merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur Renstra. Dan pertanggungjawaban akhir masa jabatan merupakan pertanggungjawaban atas tugas-tugas umum pemerintahan dan pembantuan yang merupakan kinerja Kepala Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan tolak ukur Renstra.

Dikaitkan dengan akuntabilitas keuangan (pertanggungjawaban keuangan daerah) dalam PP Nomor 105 Tahun 2000 dalam Bab VI, "Pertanggungjawaban Keuangan Daerah", maka secara tegas dalam Pasal 37 ayat (1) *Pemerintah Daerah menyapaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD;* ayat (2) *Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan sekali setelah berakhirnya triwulanan yang*

*bersangkutan*. Kemudian dalam pasal 38, dikemukakan bahwa *Kepala Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang terdiri atas laporan perhitungan APBD; Nota perhitungan APBD; Laporan Aliran Kas; dan Neraca Daerah*.

Wujud dari pertanggungjawaban tersebut saat ini adalah dengan dikembangkannya satu sistem pertanggungjawaban yang disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang implementasinya dimulai sejak penyusunan Renstra sampai dengan pertanggungjawaban kinerja dalam bentuk LAKIP (Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah) yang merupakan hasil inisiatif Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2000.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 14 Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana penerapan *good governance* pada 14 Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis?
3. Berapa besar pengaruh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan *good governance* pada 14 Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 14 Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui penerapan *good governance* pada 14 Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan *good governance* pada 14 Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

### **2.1 Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi (LAN & BPKP, 2000 : 63). Pelaksanaan SAKIP itu sendiri, terdiri dari 5 unsur dengan penjabaran sebagai berikut :

#### **1. Rencanan Strategis / Renstra**

INPRES No. 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu)

sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada dan mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi, misi dan tujuan sasaran. Cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

## **2. Rencana Kinerja**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dasar dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan secara tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan rencana kinerja ini disusun setiap awal tahun anggaran dan merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam suatu periode tahunan.

## **3. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran Kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam dalam rangka menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan /program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah (LAN, 2000 : 47).

## **4. Evaluasi Kinerja**

Evaluasi Kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi Kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Dalam melakukan evaluasi kinerja, hasilnya dikaitkan dengan sumber daya (*input*) yang berada dibawah wewenangnya seperti sumber daya manusia, dana/keuangan, sarana-prasarana, metoda kerja dan hal lainnya yang berkaitan (LAN, 2000 : 1)

## **5. Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja, terutama ditujukan untuk mendapatkan gambaran yang memadai mengenai hakikat dari akuntabilitas itu sendiri yaitu mengenai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

## **2.2 Penerapan Good Governance**

*Good Governance* adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokratisasi pasar dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, serta menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan (OECD dan World Bank dalam LAN, 2004).

Prinsip-prinsip *good governance* yang dikembangkan oleh UNDP adalah sebagai berikut :

### **1. Partisipasi**

yaitu bahwa setiap warga negara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktir.

2. **Taat Hukum / Rule of Law**  
yaitu berupa kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa diskriminasi, terutama hukum yang berlaku untuk perlindungan hak asasi manusia.
3. **Transparansi** yaitu yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Informasi mengenai proses-proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja lembaga-lembaga dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan, informasi tersebut harus dapat dipahami dan dapat dipantau.
4. **Responsif** yaitu bahwa lembaga-lembaga negara/badan usaha harus berusaha untuk melayani stakeholdernya. Responsif terhadap aspirasi masyarakat.
5. **Kesetaraan**  
yaitu bahwa semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
6. **Efektivitas dan Efisiensi**  
yaitu bahwa proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia hasilnya sebaik mungkin.
7. **Akuntabilitas**  
yaitu bahwa para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
8. **Visi Strategik**  
yaitu bahwa para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan sumber daya manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Sebagai sebuah organisasi, instansi pemerintah semakin dituntut untuk memperlihatkan pencapaian keberhasilan tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang, dan merata bagi semua pihak berkepentingan (*stakeholders*). Dengan penguasaan informasi yang seimbang, pihak-pihak yang terkait dengan organisasi dapat mengambil keputusan yang wajar. Instansi pemerintah diwajibkan untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan informasi kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga, sebagai perwujudan normatif pertanggungjawaban.

Penyampaian kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan/komunikasi capaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan yaitu fokus organisasi untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang dalam rumusan tujuan dan sasaran. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Berbagai pengungkapan ini dituangkan dalam dokumen-dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

SAKIP pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. (LAN dan BPKP, 2000 : 63). Unsur-unsur

yang terdapat pada SAKIP itu sendiri, terdiri dari rencana strategis, rencana kegiatan, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas suatu instansi yang diwujudkan melalui implementasi SAKIP sangat penting terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan suatu usaha atau kegiatan yang spesifik akan dapat dicapai dan juga dapat mencegah hilangnya sumberdaya.

Sementara itu *good governance* mengandung makna tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, pengelenggaraan pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan administrasi negara yang baik. Institusi dari *governance* memiliki 3 domain yaitu : *state* (negara/ pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat) yang saling menjalankan fungsinya masing-masing. Sementara itu menurut UNDP terdapat delapan prinsip *good governance*, yaitu partisipasi, taat hukum, transparansi, responsif, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategik.

Mengingat dewasa ini *good governance* merupakan salah satu topik pembahasan atau isu penting, maka hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kapasitas *good governance* di instansi pemerintah. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan mengimplementasikan SAKIP pada instansi pemerintah. Dengan demikian tidak hanya memastikan peningkatan kinerja tetapi juga menciptakan suatu lingkungan akuntabilitas yang didorong dan dimonitor.

Implementasi SAKIP dan penerapan *good governance* memiliki keterkaitan yang sangat erat berdasarkan pertimbangan bahwa : Pelaporan AKIP merupakan metode reformasi yang tipikal, SAKIP sebagai instrumen pertanggungjawaban / tanggung gugat / kewajiban memberikan jawaban (LAN dan BPKP, 2000 : 10); SAKIP sebagai salah satu sarana untuk perwujudan *good governance*; SAKIP sebagai jawaban atas tantangan Akuntansi Sektor Publik dalam mewujudkan akuntabilitas publik; serta *Good Governance* merupakan tujuan akhir SAKIP, (LAN dan BPKP, 2000 :13).

Berdasarkan konsep yang telah penulis uraikan, maka untuk mengetahui penerapan *good governance* dapat diukur sesuai dengan komponen-komponen yang mendasari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## **2.4 Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah “Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berpengaruh terhadap penerapan *good governance*”.

## **3. OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

### **3.1 Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penerapan *Good Governance*. Sedangkan subjek penelitiannya adalah 14 Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis

### 3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan sensus. Metode deskriptif adalah mengumpulkan data, menganalisis secara kritis atas data-data tersebut dan menyimpulkannya berdasarkan fakta-fakta pada masa penelitian berlangsung atau pada masa sekarang. (Sugiyama 2008 : 37). Sedangkan sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, hal ini sering dilakukan apabila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, (Sugiyono : 2006 : 78)

### 3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian

#### 1. Variabel Independen (*Independent Variable*)

Variabel independen yaitu variabel yang tidak terikat pada variabel lain dan mempengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya variabel lain (Sugiyama, 2008 : 58). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

#### 2. Variabel Dependen (*Dependent Variable*)

Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel independen (Sugiyama, 2008 : 58). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Penerapan *Good Governance*.

### 3.4 Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang merupakan sumber asli dan dikumpulkan secara khusus guna menjawab pertanyaan penelitian yang bersangkutan (responden). Data sekunder adalah yaitu data yang diperoleh dari pihak ketiga (selain 14 Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis), dengan kata lain data sekunder adalah interpretasi dari data primer yang sumbernya antara lain buku teks, jurnal, buku pegangan, majalah, artikel surat kabar serta sumber sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

### 3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*), teknik ini dilakukan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan melalui :
  - a. Observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.
  - b. Wawancara (*interviewing*), yaitu suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dengan responden/ pihak dinas terkait.
  - c. Kuesioner (*questionnaires*), kuesioner adalah daftar isian terstruktur yang diajukan oleh penulis kepada responden yang berhubungan erat dengan topik permasalahan, kuesioner yang penulis ajukan kepada responden mengacu kepada indikator dari variabel independen maupun variabel dependen.

2. Studi Kepustakaan (*Library and Internet Study*), teknik ini dilaksanakan untuk memperoleh data-data sekunder guna mendukung data-data primer yang diperoleh selama penelitian.

### 3.6 Populasi Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi sasaran yang penulis teliti adalah subjek yang berhubungan dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam kaitannya dengan penerapan *good governance* yaitu 14 Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

### 3.7 Metode Analisis

#### 1. Uji Kualitas Data

##### a. Pengujian Validitas Alat Ukur (*Test Of Validity*)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang di gunakan mengukur apa yang perlu di ukur. Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi akan mempunyai tingkat kesalahan yang kecil, sehingga data yang terkumpul merupakan data yang memadai.

##### b. Pengujian Reliabilitas Alat Ukur (*Test Of Realibility*)

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data yang digunakan konsisten dalam mengungkapkan fenomena tertentu dari sekelompok individu meskipun dilakukan dalam waktu yang berbeda (Nur Indriantoro : 2002).

#### 2. Analisis Koefisien Korelasi

Analisis ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk inter... dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama (Sugiyono, 2007 : 228). Berikut ini dikemukakan rumus koefisien Korelasi Produk Moment dari Pearson:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2)(n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan :

r = Koefisien korelasi

X = Variabel independen

Y = Variabel dependen

n = Jumlah responden

#### 3. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi merupakan pengkuadratan dari nilai korelasi ( $r^2$ ). Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah. Mengemukakan rumus koefisien determinasi Sudjana (2002 : 246) sebagai berikut :

$$Kd = r^2 \times 100$$

Keterangan :

Kd = Koefisien determinasi

$r^2$  = Koefisien Korelasi dikuadratkan

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen Pengukuran

Uji validitas alat ukur terhadap instrumen penelitian menunjukkan bahwa terdapat 1 pertanyaan untuk variabel implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan 3 pertanyaan untuk variabel penerapan *good governance* yang tidak valid dengan nilai t-hitung kurang dari 0.388. Disamping itu, semua pertanyaan dinyatakan reliabel karena nilai koefisien *cronbach alpha* kedua instrumen penelitian tersebut lebih besar daripada 0,70.

### 4.2 Hasil Penelitian

Variabel implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam klasifikasi baik. Hal tersebut berarti bahwa responden yaitu 14 Dinas Daerah di Kabupaten Ciamistelah membuat dokumen-dokumen dalam Sistem AKIP (Rencana Strategis / Renstra, Rencana Kinerja, Pengukuran Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja, Evaluari Kinerja) dengan baik Variabel penerapan *good governance* juga dalam klasifikasi baik. Hal tersebut berarti bahwa prinsip partisipasi, taat hukum, transparansi, daya tanggap, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategik di 14 Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis sudah diterapkan dengan baik.

### 4.3 Pembahasan

#### 1. Analisis Koefisien Korelasi

Hasil perhitungan paket program statistik SPSS 16.0 submenu *Correlate*, diketahui bahwa nilai korelasi antara kedua variabel bernilai 0.781. Angka tersebut berarti kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang kuat, sehingga dapat diartikan bahwa variabel implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penerapan *good governance* mempunyai hubungan yang kuat.

#### 2. Analisis Koefisien Determinasi

Perhitungan koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh Variabel implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan *good governance* yang dijelaskan sebagai berikut :

$Kd = r^2 \times 100 \% \dots\dots\dots$  (Sudjana, 2002 : 246)

$Kd = (0,781)^2 \times 100 \%$

$Kd = 60,9961 \% \approx 61 \%$

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi diketahui bahwa nilai  $Kd = 61\%$ . Ini berarti sebesar 61 % penerapan *good governance* dipengaruhi oleh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh implementasi SAKIP terhadap penerapan *good governance*, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis deskripsi, diketahui bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 14 Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis termasuk dalam klasifikasi baik. Penilaian tersebut diukur menggunakan indikator Perencanaan Strategik, Rencana Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.
2. Berdasarkan hasil analisis deskripsi, diketahui bahwa penerapan *good governance* pada 14 Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis termasuk dalam klasifikasi baik. Penilaian tersebut diukur menggunakan indikator partisipasi, taat hukum, transparansi, daya tanggap, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategik
3. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi, diketahui bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penerapan *good governance* memiliki hubungan kuat. Selain itu berdasarkan perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa 61 % dari penerapan *good governance* dipengaruhi oleh implementasi SAKIP, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti.

### 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Setiap Dinas Daerah disarankan memiliki *e-mail* dan *website* khusus untuk mempublikasikan dokumen-dokumen SAKIP dalam rangka penerapan *good governance*.
2. Mengubah ataupun menambah variabel dalam penelitian selanjutnya yang kemudian dapat diperbandingkan dengan hasil penelitian penulis.
3. Memperbanyak subjek penelitian supaya hasil penelitian lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmawi. Rewansyah. 2010. *Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance*. Jakarta : Yusaintanas Prima.
- Harun. Al Rasyid. 1998. *Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala*. Tidak dipublikasikan, Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran Bandung.
- BPS dan Bappeda Kabupaten Ciamis. 2009. *Ciamis Regency in Figures 2009 (Kabupaten Ciamis dalam Angka Tahun 2009)*. BPS : Kabupaten Ciamis.
- Bayu. Nurzaman. 2010. *Pengaruh Audit Internal terhadap Good Governance*. Skripsi yang tidak dipublikasikan, Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
- Donald Cooper and Willian Emory. 1996. *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi 5. Jakarta : Erlangga.
- Deddi. Noordiawan. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Gima. Sugjama. 2008. *Metode Riset Bisnis dan Manajemen*, Edisi Pertama. Bandung : Gordaya Intimarta.
- Halimi. Firdausi. 2009. *Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance*. Skripsi yang tidak dipublikasikan, Konsentrasi Akuntansi Pemerintahan, Universitas Padjajaran Bandung.
- Indra. Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Jana. Rustia Permana. 2008. *Hubungan Penerapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah*. Skripsi yang tidak dipublikasikan, Konsentrasi Akuntansi Pemerintahan, Universitas Padjajaran Bandung.
- Joko. Widodo. 2001. *Good Governance, Telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya : Insan Cendikia.
- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance (Modul Sosialisasi Sistem AKIP)*, Modul 1 dari 5. Jakarta : LAN
- \_\_\_\_\_. 2000. *Perencanaan Strategik Instansi Pemerintah (Modul Sosialisasi Sistem AKIP)*, Modul 2 dari 5. Jakarta : LAN
- \_\_\_\_\_. 2000. *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (Modul Sosialisasi Sistem AKIP)*, Modul 3 dari 5. Jakarta : LAN
- \_\_\_\_\_. 2000. *Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (Modul Sosialisasi Sistem AKIP)*, Modul 4 dari 5. Jakarta : LAN
- \_\_\_\_\_. 2000. *Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Modul Sosialisasi Sistem AKIP)*, Modul 5 dari 5. Jakarta : LAN
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Empat. Yogyakarta : ANDI

- \_\_\_\_\_. 2001. *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti, Vol. 3 No. 2.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Serial Otonomi Daerah : "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah"*, Edisi Dua. Yogyakarta : ANDI.
- Masri. Singarimbun. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Mudrajat. Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Strategi dan Peluang)*. Jakarta : Erlangga.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Nur. Indriantoro dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama*. Yogyakarta : BPF
- Nisa. Noor Wahid. 2004. *Pengaruh Siklus Anggaran dan Pengawasan Intern terhadap Good Governance*. Skripsi yang tidak dipublikasikan, Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
- Pemerintah Kabupaten Ciamis. 2010. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Ciamis Tahun 2009*. Ciamis : Pemerintah Kabupaten Ciamis
- P2KP I-LAN. 2007. *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah daerah Kabupaen / Kota*. Jakarta : Pusat Kajian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN (PKP2A I LAN).
- Rukaesih. 2004. *Peranan Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) terhadap Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*. Skripsi yang tidak dipublikasikan, Konsentrasi Akuntansi Pemerintahan, Universitas Padjajaran Bandung.
- Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurahman. 2007. *Analisa Korelasi Regresi dan Jalur dalam Penelitian*. Bandung : Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfa-Beta.
- Suharsini Arikunto. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V. Jakarta : PT. Bineka Cipta.
- Suliyanto. 2005. *Analisis Data dalam Aplikasi Pemasaran*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Uma. Sekaran. 2006. *Research Method For Business*, Buku 1 dan 2, Edisi Empat. Jakarta : Salemba Empat.
- Wanalia. Wulan. 2008. *Pengaruh Audit Intern terhadap Good Corporate Governance*. Skripsi yang tidak dipublikasikan, Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
- Wilfrid J. Dixon and Frank J.Massey, Jr. 1997. *Pengantar Analisis Statistik*, Edisi Keempat. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

### **Peraturan dan Perundang-undangan**

Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000. Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998. Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008. Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007. Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.